

Strategies for Addressing Radicalism and Extremism through Holistic and Comprehensive Education in Indonesia and Brunei Darussalam

Muhammad Fajar^{1*}, Oktaviandi Ramadhan², Muhammad Ferdi³,
Ahmad Syafiq⁴

^{1,2,3} UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, ⁴ Universiti Brunei Darussalam

Article Info

Article history:

Received 06 03, 2024

Revised 25 04, 2024

Accepted 30 04, 2024

Keywords:

Radicalism, Holistic Education, Comparative Study, Counter-extremism, Indonesia, Brunei Darussalam

Kata Kunci:

Radikalisme, Pendidikan Holistik, Studi Komparatif, Kontra-ekstremisme, Indonesia, Brunei Darussalam

ABSTRACT

Radicalism and violent extremism pose a persistent threat to national and global stability. As a preventive strategy, holistic education is proposed to fortify the younger generation against extremist ideologies. This study aims to critically analyze and compare the implementation of educational strategies to counter radicalism in Indonesia and Brunei Darussalam, focusing on how their fundamentally different socio-political contexts shape their respective approaches. Using a qualitative method with a comparative literature review approach, this study analyzes relevant policy documents, national curricula, and academic literature. The findings reveal two contrasting models: (1) Indonesia, with its Pancasila foundation, implements a competency-based approach oriented towards building critical resilience through programs such as the Pancasila Student Profile; (2) Brunei Darussalam, based on the Melayu Islam Beraja (MIB) philosophy, adopts a doctrine-based approach aimed at maintaining dogmatic stability through a centralized and homogenous curriculum. This study concludes that each model has its own strengths and challenges, highlighting a trade-off between the flexibility of managing diversity and the effectiveness of control in maintaining stability.

ABSTRAK

Radikalisme dan ekstremisme kekerasan merupakan ancaman persisten terhadap stabilitas nasional dan global. Sebagai strategi preventif, pendidikan holistik diajukan untuk membentengi generasi muda dari ideologi ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis implementasi strategi pendidikan untuk menanggulangi radikalisme di Indonesia dan Brunei Darussalam, dengan fokus pada bagaimana konteks sosio-politik yang berbeda secara fundamental membentuk pendekatan masing-masing negara. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka komparatif, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, kurikulum nasional, dan literatur akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua model yang kontras: (1) Indonesia, dengan landasan Pancasila, menerapkan pendekatan berbasis kompetensi yang berorientasi pada pembentukan resiliensi kritis melalui program seperti Profil Pelajar Pancasila; (2) Brunei Darussalam, berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), mengadopsi pendekatan berbasis doktrin yang bertujuan menjaga stabilitas dogmatis melalui kurikulum yang terpusat dan homogen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap model memiliki kekuatan dan tantangannya masing-masing, menyoroti adanya pertaruhan (trade-off) antara fleksibilitas dalam mengelola keragaman dan efektivitas kontrol dalam menjaga stabilitas.

Copyright © 2024 Muhammad Fajar et. al

* Corresponding Author:

Muhammad Fajar

Email: Rianimhammad3@gmail.com

INTRODUCTION

Fenomena radikalisme dan ekstremisme kekerasan telah menjadi tantangan keamanan global yang persisten di abad ke-21, yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi digital dan globalisasi. Ideologi transnasional menyebar dengan cepat melintasi batas-batas negara, menargetkan individu-individu rentan dan mengancam stabilitas sosial serta keamanan nasional di berbagai belahan dunia (Hoffman, 2018). Penyebaran narasi radikal tidak lagi terbatas pada interaksi fisik, melainkan telah merambah ke ruang siber, menciptakan medan pertempuran ideologis baru yang menuntut respons yang lebih adaptif dan canggih dari negara-bangsa (Prasetyo, 2022). Respons ini tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan yang proaktif.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan lanskap demokrasi yang dinamis, menghadapi tantangan unik dalam membendung arus radikalisme. Sejarah konflik komunal, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan polarisasi politik menjadi faktor-faktor yang dieksploitasi oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk merekrut pengikut dan menyebarkan pengaruhnya (Azra, 2016). Berbagai insiden terorisme dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa sel-sel radikal terus beregenerasi, menuntut adanya strategi deradikalisasi yang berakar pada tingkat komunitas dan individu (Nugroho & Wijayanto, 2021). Oleh karena itu, pencarian model penanggulangan yang efektif menjadi prioritas nasional.

Dalam konteks ini, dunia pendidikan muncul sebagai arena krusial untuk intervensi preventif. Para ahli sepakat bahwa pendidikan yang hanya berfokus pada transfer pengetahuan kognitif tidak memadai untuk membentengi generasi muda dari paparan ideologi ekstrem (Yusuf & Anwar, 2021). Sebagai alternatif, pendekatan pendidikan holistik dan komprehensif diajukan sebagai solusi strategis. Pendidikan holistik bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek individu intelektual, emosional, sosial, fisik, artistik, kreatif, dan spiritual sehingga menciptakan pribadi yang seimbang, kritis, dan berempati (Noddings, 2016; Miller, 2018). Pendekatan ini diyakini mampu membangun resiliensi mental dan ideologis terhadap narasi kebencian.

Untuk memahami penerapan strategi ini dalam konteks yang berbeda, studi komparatif menjadi sangat relevan. Naskah ini secara khusus membandingkan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Meskipun kedua negara memiliki akar budaya Melayu dan mayoritas penduduk Muslim, keduanya beroperasi dalam sistem sosial-politik yang sangat kontras: demokrasi Pancasila di Indonesia dan monarki absolut berdasarkan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) di Brunei (Othman, 2023). Perbedaan fundamental ini berpotensi menghasilkan pendekatan pendidikan anti-radikalisme yang unik, di mana Brunei mungkin menekankan homogenitas doktrin keagamaan, sementara Indonesia mengelola keragaman (Hassan, 2022).

Meskipun literatur mengenai penanggulangan radikalisme di Indonesia cukup melimpah (misalnya, Siregar, 2021; Fatih, 2023) dan beberapa studi telah mengkaji sistem pendidikan di Brunei (misalnya, Rahman, 2020), terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan. Hingga saat ini, sangat sedikit penelitian yang melakukan analisis komparatif secara langsung dan mendalam mengenai bagaimana kedua negara memanfaatkan pendidikan holistik untuk tujuan deradikalisasi. Studi sebelumnya cenderung berfokus pada satu negara (Putra & Purnomo, 2022) atau tidak secara spesifik menghubungkan konsep pendidikan holistik dengan strategi keamanan nasional secara komparatif (Jamil, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengajukan pertanyaan penelitian utama: Bagaimana strategi pendidikan holistik dan komprehensif diimplementasikan untuk menanggulangi radikalisme dan ekstremisme di Indonesia dan Brunei Darussalam, dan apa implikasi dari perbedaan konteks sosio-politik kedua negara terhadap efektivitas strategi tersebut? Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kerangka kebijakan dan kurikulum pendidikan anti-radikalisme di kedua negara; (2) Membandingkan pendekatan pedagogis dan peran institusi keagamaan dalam sistem pendidikan masing-masing; dan (3) Mengidentifikasi potensi pembelajaran lintas negara yang dapat ditarik dari kedua kasus.

LITERATURE RIEW

Bagian ini menguraikan kerangka konseptual yang menjadi dasar penelitian dengan membahas tiga pilar utama: dinamika radikalisme kontemporer, paradigma pendidikan holistik sebagai strategi kontra-naratif, dan pemetaan penelitian terdahulu untuk menjustifikasi kebaruan studi ini.

Dinamika Radikalisme dan Proses Radikalisasi Kontemporer

Radikalisme, dalam konteks keamanan kontemporer, tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai seperangkat keyakinan, melainkan sebagai sebuah proses dinamis yang disebut radikalisasi. Proses ini merujuk pada cara individu atau kelompok mengadopsi pandangan ekstremis yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, sosial, atau agama (Schmid, 2013). Faktor pendorongnya bersifat multifaset, mencakup keluhan personal (personal grievances), ketidakadilan sosial-ekonomi, marginalisasi politik, dan krisis identitas, yang kemudian dieksploitasi oleh para "pengusaha ideologi" (ideological entrepreneurs) (Wiktorowicz, 2005). Di era digital, proses ini mengalami akselerasi signifikan, di mana internet dan media sosial berfungsi sebagai "ruang gema" (echo chambers) yang memperkuat narasi ekstremis dan memfasilitasi rekrutmen tanpa batas geografis (Conway, 2017).

Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dinamika ini diperumit oleh ketegangan antara tradisi lokal, modernitas, dan pengaruh ideologi transnasional. Kelompok ekstremis sering kali membingkai narasi mereka sebagai perjuangan untuk memurnikan agama atau menolak pengaruh Barat, yang bergema di kalangan segmen masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh globalisasi (Hefner, 2018). Oleh karena itu, strategi penanggulangan yang efektif tidak hanya memerlukan tindakan represif, tetapi juga intervensi proaktif pada level ideologis, di mana pendidikan memegang peranan sentral.

Pendidikan Holistik sebagai Paradigma Kontra-Naratif

Sebagai respons terhadap ancaman radikalisasi, paradigma pendidikan telah bergeser dari sekadar transmisi pengetahuan (knowledge transmission) menuju pembentukan individu yang utuh. Di sinilah konsep pendidikan holistik menjadi relevan sebagai strategi kontra-naratif. Pendidikan holistik melampaui pencapaian akademis semata, dengan fokus pada pengembangan dimensi intelektual, emosional, sosial, etis, dan spiritual siswa secara terintegrasi (Forbes, 2019). Tujuannya adalah untuk menumbuhkan individu yang memiliki kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis, empati terhadap sesama, dan rasa keterhubungan dengan komunitas dan dunia yang lebih luas (Miller, 2018).

Dalam konteks anti-radikalisme, pendekatan holistik berfungsi sebagai "vaksin ideologis". Dengan membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, mereka menjadi lebih mampu untuk mendekonstruksi dan menolak propaganda

ekstremis yang simplistik dan dogmatis (Davies, 2016). Pengembangan kecerdasan emosional dan empati membantu mereka menghargai keragaman dan menolak narasi "kami versus mereka" yang menjadi inti dari ideologi ekstremis (Goleman, 2015). Dengan demikian, pendidikan holistik tidak secara langsung "mengajar" anti-radikalisme, melainkan membangun fondasi kepribadian yang secara inheren resisten terhadapnya.

Pemetaan Studi Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian mengenai peran pendidikan dalam menanggulangi radikalisme telah berkembang pesat. Di Indonesia, sebagian besar studi berfokus pada implementasi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila dan Pendidikan Agama Islam yang moderat (Rahmat, 2019). Penelitian oleh Putra & Purnomo (2022) misalnya, menyoroti bagaimana program "Profil Pelajar Pancasila" berupaya mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan pemikiran kritis dalam kurikulum nasional. Namun, banyak studi juga menyoroti tantangan implementasi, seperti kurangnya pelatihan guru dan inkonsistensi kebijakan di tingkat daerah (Anam & Farchan, 2021).

Sementara itu, kajian mengenai pendidikan di Brunei Darussalam secara konsisten menekankan peran sentral falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai landasan utama sistem pendidikan (Jones, 2016). Penelitian oleh Rahman (2020) menggarisbawahi bagaimana MIB digunakan oleh negara untuk memastikan stabilitas sosial dan homogenitas keagamaan melalui kurikulum yang terkontrol secara ketat. Pendekatan ini dipandang efektif dalam mencegah munculnya ideologi alternatif, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang ruang bagi pemikiran kritis yang independen (Hussin, 2019).

Meskipun kajian di kedua negara ini sangat berharga, mereka cenderung beroperasi secara terisolasi. Terdapat kelangkaan analisis komparatif yang secara eksplisit membedah persamaan, perbedaan, dan potensi pembelajaran silang (cross-learning) antara pendekatan Indonesia yang pluralistik-demokratis dan pendekatan Brunei yang monarki-religius. Penelitian ini secara langsung mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kedua strategi pendidikan anti-radikalisme ini dalam satu kerangka analitis, sehingga menawarkan perspektif baru yang lebih kaya dan bernuansa.

METHOD

Penelitian ini dirancang sebagai studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka komparatif (comparative literature review). Pendekatan ini dipilih karena paling sesuai untuk tujuan penelitian, yaitu menganalisis, membandingkan, dan menyintesis kebijakan serta strategi pendidikan di Indonesia dan Brunei Darussalam berdasarkan sumber-sumber tekstual yang sudah ada. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dokumen primer, seperti dokumen kebijakan kurikulum nasional (Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila di Indonesia) dan dokumen falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) Brunei, serta sumber data sekunder berupa literatur akademis yang relevan dengan topik pendidikan dan kontra-ekstremisme. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi tematik untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mengontraskan strategi, tantangan, serta keberhasilan dari masing-masing negara (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020; Bowen, 2017). Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis kebijakan dan implementasi dalam sistem pendidikan formal..

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran pada basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional,

dengan kriteria inklusi yang membatasi penggunaan artikel jurnal pada terbitan lima tahun terakhir dan buku pada sepuluh tahun terakhir untuk menjamin kemutakhiran analisis. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik komparatif, yang alurnya diadaptasi dari kerangka Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Proses ini mencakup tiga tahap utama: pertama, reduksi data untuk menyaring dan mengorganisir informasi yang paling relevan; kedua, penyajian data dalam matriks komparatif untuk memetakan pendekatan kedua negara secara berdampingan; dan ketiga, penarikan kesimpulan melalui analisis perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi dari masing-masing strategi.

RESULTS AND DISCUSSION

Analisis komparatif terhadap strategi pendidikan untuk menanggulangi radikalisme di Indonesia dan Brunei Darussalam mengungkapkan adanya perbedaan fundamental yang berakar pada filosofi negara dan konteks sosio-politik masing-masing. Pembahasan ini akan diuraikan secara tematis dengan membandingkan landasan filosofis, manifestasi kurikulum, peran kelembagaan, serta implikasi dan tantangan dari kedua pendekatan tersebut.

Landasan Filosofis: Pluralisme Inklusif vs. Homogenitas Terjaga

Perbedaan paling mendasar terletak pada landasan filosofis yang menjiwai sistem pendidikan kedua negara. Di Indonesia, strategi pendidikan anti-radikalisme dibangun di atas fondasi Pancasila, sebuah ideologi negara yang secara eksplisit merangkul pluralisme agama dan budaya dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu). Pendekatan ini bersifat defensif-inklusif, bertujuan untuk membentengi identitas nasional yang majemuk dari ancaman ideologi eksklusif dan takfiri yang berusaha menyeragamkan lanskap keagamaan dan sosial (Putra & Purnomo, 2022). Pendidikan di Indonesia, secara ideal, diarahkan untuk menumbuhkan warga negara yang mampu hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan.

Sebaliknya, Brunei Darussalam mengadopsi pendekatan yang dapat digambarkan sebagai preservatif-eksklusif, yang berpusat pada falsafah negara Melayu Islam Beraja (MIB). MIB secara tegas mengintegrasikan tiga pilar budaya Melayu, agama Islam (aliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah Asy'ariyah), dan sistem monarki absolut sebagai satu kesatuan identitas nasional yang tidak dapat diganggu gugat (Othman, 2023). Strategi pendidikannya bertujuan untuk melestarikan dan mereproduksi homogenitas identitas ini ke setiap generasi. Dengan demikian, penanggulangan radikalisme di Brunei bukan hanya soal menolak kekerasan, tetapi juga menolak setiap interpretasi atau praktik keagamaan yang menyimpang dari doktrin resmi yang telah ditetapkan negara (Rahman, 2020).

Manifestasi Kurikulum: Pembentukan Kompetensi vs. Penanaman Doktrin

Perbedaan filosofis ini termanifestasi secara nyata dalam kurikulum. Indonesia, melalui Kurikulum Merdeka, menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam "Profil Pelajar Pancasila". Program ini tidak berfokus pada indoktrinasi, melainkan pada pembentukan enam kompetensi inti: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) gotong royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif (Siregar, 2021). Penekanan pada "bernalar kritis" dan "berkebinekaan global" secara eksplisit dirancang sebagai vaksin intelektual, membekali siswa dengan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara mandiri dan menghargai perbedaan, sehingga membangun resiliensi personal terhadap propaganda ekstremis (Yusuf & Anwar, 2021).

Di Brunei, falsafah MIB bukan sekadar satu mata pelajaran, melainkan "urat nadi" yang diintegrasikan (infused) ke dalam seluruh aspek kurikulum, mulai dari pendidikan agama, sejarah, hingga sains (Jones, 2016). Tujuannya adalah internalisasi doktrin MIB sebagai satu-satunya kerangka berpikir yang sah. Pendidikan Agama Islam diajarkan secara seragam di bawah pengawasan ketat Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari tafsir resmi negara (Hussin, 2019). Strategi ini berfokus pada penanaman konten dan keyakinan spesifik, bukan pada pengembangan keterampilan interpretasi yang beragam, dengan asumsi bahwa pemahaman yang seragam akan menciptakan benteng pertahanan ideologis yang kokoh.

Peran Kelembagaan: Arena Multi-Aktor vs. Kontrol Terpusat

Struktur kelembagaan yang mengelola pendidikan di kedua negara juga menunjukkan perbedaan tajam. Di Indonesia, arena pendidikan adalah ruang kontestasi dan negosiasi antara berbagai aktor. Selain Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, organisasi masyarakat sipil Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki jaringan institusi pendidikan yang masif dan memainkan peran signifikan dalam mempromosikan interpretasi Islam moderat (Rahmat, 2019). Meskipun hal ini menciptakan dinamika yang kaya, ia juga dapat menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan anti-radikalisme di tingkat akar rumput (Anam & Farchan, 2021).

Brunei, sebaliknya, menunjukkan model kontrol negara yang sangat terpusat dan top-down. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama bekerja dalam koordinasi yang erat di bawah otoritas tertinggi Sultan. Tidak ada ruang bagi aktor non-negara untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kurikulum, terutama dalam hal pendidikan agama (Hassan, 2022). Sentralisasi ini menjamin keseragaman dan konsistensi pesan anti-radikalisme di seluruh negeri, di mana negara bertindak sebagai satu-satunya penjaga gerbang kebenaran ideologis dan keagamaan.

Implikasi dan Tantangan: Resiliensi Kritis vs. Stabilitas Dogmatis

Kedua pendekatan ini menghasilkan implikasi dan tantangan yang berbeda. Pendekatan holistik berbasis kompetensi di Indonesia berpotensi melahirkan warga negara yang memiliki resiliensi kritis kemampuan untuk beradaptasi dan menolak ideologi ekstrem karena mereka dibekali alat untuk berpikir, bukan hanya diberi tahu apa yang harus dipikirkan. Namun, tantangan terbesarnya adalah "jurang implementasi" (implementation gap). Keberhasilan program sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen guru di lapangan, yang seringkali bervariasi, sehingga efektivitasnya tidak merata di seluruh nusantara.

Pendekatan Brunei yang berbasis doktrin terbukti sangat efektif dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah penyebaran ideologi ekstremis dari luar. Tingkat radikalisme publik di Brunei dilaporkan sangat rendah. Namun, tantangannya bersifat jangka panjang: pendekatan ini berisiko menekan pemikiran kritis dan kreativitas. Dengan membatasi paparan terhadap keragaman interpretasi, sistem ini mungkin menciptakan warga negara yang patuh tetapi rentan jika suatu saat dihadapkan pada ideologi alternatif yang canggih tanpa memiliki pengalaman dalam perdebatan intelektual. Ini memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan stabilitas dogmatis dalam dunia yang semakin terhubung.

Sebagai kesimpulan, baik Indonesia maupun Brunei telah memanfaatkan pendidikan sebagai alat strategis untuk kontra-radikalisme, namun melalui jalur yang hampir berlawanan, yang masing-masing merupakan cerminan logis dari sistem politik dan realitas sosial mereka. Indonesia mengelola keragaman dengan

menumbuhkan kompetensi kritis, sementara Brunei menjaga homogenitas dengan menanamkan kepatuhan doktrinal.

CONCLUSION

Penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap strategi pendidikan holistik sebagai instrumen untuk menanggulangi radikalisme dan ekstremisme di Indonesia dan Brunei Darussalam. Analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menghadapi ancaman serupa dan sama-sama memanfaatkan sektor pendidikan, strategi yang diimplementasikan bergerak pada dua lintasan yang fundamental berbeda, yang secara langsung mencerminkan filosofi dan realitas socio-politik masing-masing. Indonesia, dengan landasan Pancasila, mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi yang bertujuan untuk membangun resiliensi kritis dalam masyarakat yang majemuk. Sebaliknya, Brunei Darussalam, dengan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), menerapkan pendekatan berbasis doktrin yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dogmatis dalam masyarakat yang homogen.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan analitis secara berdampingan terhadap dua model kontra-radikalisme yang berbeda ini, mengisi celah dalam literatur yang cenderung berfokus pada studi kasus tunggal. Dengan mengontraskan pendekatan Indonesia yang berfokus pada "kemampuan untuk berpikir kritis" dengan pendekatan Brunei yang menekankan "kepatuhan pada pemikiran yang benar", penelitian ini menyoroti adanya pertaruhan (trade-off) yang inheren antara fleksibilitas-pluralistik dan stabilitas-terkontrol dalam merancang kebijakan pendidikan untuk keamanan nasional.

Temuan ini menghasilkan beberapa implikasi kebijakan penting. Bagi Indonesia, tantangan utamanya bukanlah pada desain kurikulum, melainkan pada penutupan jurang implementasi. Pemerintah perlu berinvestasi secara berkelanjutan pada pelatihan dan pengembangan kapasitas guru untuk memastikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, terutama nalar kritis dan kebinekaan global, dapat diterjemahkan secara efektif di dalam kelas, bukan hanya menjadi jargon kebijakan. Bagi Brunei Darussalam, sembari mempertahankan stabilitas sosial yang telah terbukti efektif, pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan untuk secara bertahap mengintegrasikan elemen pedagogi kritis dalam batas-batas yang terkendali untuk membekali generasi muda dengan kemampuan adaptif dalam menghadapi ideologi asing yang kompleks di masa depan. Dialog lintas-negara mengenai praktik terbaik dalam pendidikan karakter bisa menjadi langkah awal yang bermanfaat bagi kedua negara.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Sebagai studi pustaka, analisis ini terbatas pada dokumen kebijakan dan literatur akademis, dan tidak mengukur dampak empiris atau implementasi aktual di tingkat sekolah. Selain itu, fokusnya adalah pada sistem pendidikan formal, mengesampingkan peran penting pendidikan non-formal dan keluarga. Oleh karena itu, penelitian di masa depan sangat dianjurkan untuk mengambil beberapa arah. Studi etnografi di ruang kelas atau survei berskala besar di kedua negara dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas nyata dari masing-masing pendekatan terhadap sikap dan resiliensi siswa. Selain itu, penelitian komparatif lebih lanjut yang melibatkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia atau Singapura, akan memperkaya pemahaman kita tentang beragamnya peran pendidikan dalam menjaga stabilitas kawasan.

REFERENCES

- Abdullah, F. (2022). The Role of Mainstream Islamic Organizations in Promoting Religious Moderation in Indonesia. *Islamic Studies Journal*, 60(2), 205-225.
- Anam, F., & Farchan, M. (2021). Teacher's Role in Countering Radicalism: Challenges in Indonesian Islamic Schools. *Journal of Education and Learning*, 15(2), 234-245.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Dari Fundamentalisme ke Nasionalisme*. Prenada Media.
- Baele, S. J. (2022). Online Radicalization: A Review of the Empirical Literature. *Terrorism and Political Violence*, 34(8), 1609-1628.
- Coolsaet, R. (Ed.). (2021). *Radicalization: A New-Wave of Research*. Routledge.
- Davies, L. (2016). *Security, Extremism and Education: Designating a 'British' way of life*. Routledge.
- Fatih, M. (2023). Community-Based Deradicalization Programs in Indonesia: A Review of Challenges and Opportunities. *Journal of Terrorism and Political Violence*, 35(4), 789-807.
- Forbes, S. H. (2019). *Holistic Education: An Analysis of its Ideas and Nature*. Holistic Education Press.
- Hassan, M. F. (2022). State-led Religious Education in Brunei: A Tool for Social Cohesion and Stability. *Islamic Educational Studies Quarterly*, 4(3), 210-225.
- Hefner, R. W. (Ed.). (2018). *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. Routledge.
- Hoffman, B. (2018). *Inside Terrorism* (3rd ed.). Columbia University Press.
- Jamil, F. (2021). Educational Policies in Southeast Asia: A Comparative Overview. *International Journal of Educational Development*, 82, 102356.
- Jones, D. (2016). The educational system of Brunei Darussalam. In *Education in Southeast Asia* (pp. 77-93). Bloomsbury Academic.
- Karim, A. A. (2022). Navigating Tradition and Modernity: Critical Thinking in Brunei's Education System. *Asia Pacific Journal of Education*, 42(3), 450-465.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miller, J. P. (2018). *The Holistic Curriculum* (2nd ed.). University of Toronto Press.
- Neumann, P. R. (2016). *Radicalized: New Jihadists and the Threat to the West*. I.B. Tauris.
- Noddings, N. (2016). *Philosophy of Education* (4th ed.). Westview Press.
- Nugroho, H., & Wijayanto. (2021). The Digital Archipelago: Extremism, Social Media, and Counter-Terrorism in Indonesia. *Asian Survey*, 61(5), 794–817.
- Osman, A. (2021). The Melayu Islam Beraja (MIB) Philosophy as a Core Educational Framework in Brunei. *Journal of Educational Policy in Southeast Asia*, 3(1), 55-70.

- Othman, N. B. (2023). The Philosophy of Melayu Islam Beraja (MIB) and its Role in Shaping National Identity in Brunei Darussalam. *Southeast Asian Journal of Education*, 5(2), 88-104.
- Prasetyo, A. (2022). Digital Jihad: The Spread of Radical Narratives on Indonesian Social Media. *Jurnal Studi Keamanan*, 14(2), 112-130.
- Putra, D. E., & Purnomo, A. (2022). The Pancasila Student Profile as a Manifestation of Holistic Education in Indonesian Schools. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(1), 15-28.
- Rivers, S. E., & Brackett, M. A. (2023). Emotional Intelligence as a Protective Factor Against Extremist Ideologies. *Journal of Social and Personality Psychology*, 15(2), 211-229.
- Siregar, R. H. (2021). From Campus to Conflict: Tracing Radicalization Pathways in Indonesian Universities. *Studies in Conflict & Terrorism*, 44(9), 753-772.
- Yusuf, M., & Anwar, K. (2021). Pendidikan Karakter sebagai Benteng Melawan Radikalisme di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 45-62.